

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penulisan tesis ini dimulai pada saat menyongsong perwujudan model "Dual System" antara lembaga pendidikan dan dunia kerja. Pada saat itu masih dipergunakan istilah "magang", yang lazimnya istilah tersebut sering dipergunakan pada lingkungan Depnaker bagi orang-orang yang mengalami putus sekolah maka mereka melakukan magang di tempat-tempat kerja. Sedangkan di dalam hubungan kerjasama antara sekolah dan industri atau perusahaan, para siswa yang mendapatkan pendidikan baik di sekolah maupun industri disebut dengan melaksanakan program "Pendidikan Sistem Ganda", yang sekarang sudah mulai banyak dikenal di lingkungan pendidikan, walaupun pada kenyataannya pelaksanaan program PSG ini masih dalam rintisan menuju PSG yang sebenarnya dalam tahun ajaran 1995/1996 nanti.

Penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai masalah ini, agar dapat mengetahui dengan pasti bagaimanakah proses berlangsungnya hubungan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja umumnya, dan khususnya antara sekolah pendidikan kejuruan dengan industri yang bersangkutan.

Untuk lebih memperkuat penulisan tesis ini, penulis mencari beberapa teori yang dapat mendukung topik permasalahan di dalam tesis ini, sehingga penulis meng-

harapkan dapat menemukan adanya hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat menjelaskan mengapa harus dilaksanakan suatu hubungan kerjasama antara lembaga pendidikan yang akan menghasilkan tenaga terdidik dengan dunia kerja yang akan menggunakan tenaga tersebut. Pada kenyataannya, penulis telah mendapatkan beberapa tulisan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain seperti yang tercantum di bawah ini.

Kerjasama diantara dunia pendidikan dan dunia usaha bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru terutama bagi negara-negara yang sudah maju. Conklin (1978) di dalam bukunya *Improving University Teaching* menguraikan hubungan kerjasama diantara universitas di New Jersey dan perusahaan multi nasional. Program ini merancang untuk menentukan program pendidikan baru untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari industri. Studi tersebut menunjukkan bahwa revolusi dalam teknologi tidak mungkin membuat dunia pendidikan untuk tetap aktual jika tidak ada kerjasama diantara industri dan wakil perusahaan dalam mempersiapkan pekerja-pekerja untuk masuk dunia industri.

Pada awal tahun 1988 sebuah perusahaan yang mewakili lembaga VEF (Victorian Education Foundation) menyatakan bahwa pekerja-pekerja lulusan dari pendidikan memiliki sedikit ide dalam hal kerja dan tidak mengenal kecenderungan terakhir dan perkembangan dalam latihan kerja dan teknologi mutakhir, oleh karena itu para lulusan pendidikan tersebut kegunaannya sedikit dan

kurang produktif pada pekerjaannya. Kesalahan ini diakibatkan pengajaran akademis yang kurang baik, yang tidak "menyentuh" terhadap perkembangan terakhir, dan secara umum para gurunya kurang kompeten.

Pada akhirnya David M. Dawkins di dalam buku yang sama dengan Conklin mengadakan penelitian mengenai masalah ini, apakah hambatan-hambatan yang dikemukakan di atas tadi dapat dibenarkan atau tidak. Penelitian tersebut melibatkan wawancara dengan wakil-wakil dari perusahaan besar, lembaga bisnis Australia (The Business Council of Australian), perusahaan-perusahaan kecil, para majikan dari federasi Victoria (The Victorian Employers Federation), guru-guru Perguruan Tinggi (Tertiary Teachers), dan murid-murid. Dengan ringkasan isi papernya mengenai Relevansi pandangan bisnis terhadap mata kuliah bagi universitas dan sekolah-sekolah pendidikan tinggi.

Di Indonesia akhir-akhir ini, pada media masa maupun makalah-makalah hasil penelitian telah banyak disorot kembali tentang keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja. Ada penilaian bahwa terdapat kesenjangan (*gap, mismatch*) antara keduanya, dimana kualifikasi lulusan pendidikan tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang dituntut oleh dunia kerja. Berbagai upaya perlu dilakukan untuk mempersempit atau kalau mungkin menghilangkan kesenjangan ini (Conny R. Semiawan, 1991).

Laporan penelitian Zulkabir (Media Pendidikan

No.4/IX/Desember 1990) adalah pihak industri belum cukup puas dengan mutu lulusan Sekolah Teknologi Mene- ngah (STM), dengan mempertimbangkan faktor sikap mental sebagai pertimbangan utama, kemudian kemampuan kognisi dan terakhir keterampilan motorik dalam bidang keahlian tertentu.

Menurut pihak industri, kemampuan dan keterampilan motorik adalah suatu hal yang penting, tetapi hal ini- pun belum secara memadai dimiliki oleh lulusan STM. Lebih daripada itu, sikap mental positif dalam pekerja- an dan kemampuan nalar, yang mendorong kemampuan krea- tif, antisipatif, serta adaptif terhadap perkembangan (teknologi dan kultur industri), adalah merupakan kua- litas yang diharapkan pihak industri.

Adapula hasil yang positif dengan terselenggaranya STM Negeri Perkapalan Sidoarjo yang berdasarkan perjan- jian kerjasama antara Dirjen Dikdasmen Depdikbud, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), serta PT. PAL Indonesia (Persero) (Republika, 13/9/93).

Kerjasama itu telah terselenggara dalam bentuk sistem magang, atau praktek kerja, yang menghasilkan para lulusan menjadi ready for use di bidang ilmu per- kapalan. Walaupun STM ini sampai 13/9/93 belum mengha- silkan lulusan karena usianya yang baru menginjak tiga tahun, tetapi STM ini merupakan perintis konsep pendi- dikan dual system. Bahkan lebih jauh PT PAL turut me- nentukan jumlah siswa yang diterima sesuai dengan yang dibutuhkan karena bantuan PT tersebut sudah dalam ben-

balik paling tinggi di Indonesia masih menjadi pertanyaan yang perlu dijelaskan. Bahkan dari beberapa studi terbukti bahwa "ROR" (rate of return) - rata-rata lulusan yang bekerja, lulusan Sekolah Teknologi Menengah (STM) lebih rendah dibandingkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) (lihat tabel 1.1 di bawah ini).

Tabel 1.1
Rate of Return terhadap Pendidikan di Indonesia

Tingkat Pendidikan	ROR	Sumber
A. Social Rate of Return		
1. Sekolah Dasar	0.22	Psacharopoulos, (1982)
2. Sekolah Menengah SMA STM	0.16	Psacharopoulos, (1982)
	0.32	Clark, (1983)
	0.18	Clark, (1983)
3. Pendidikan Tinggi	0.15	Psacharopoulos, (1982)
B. Private Rate of Return		
1. Sekolah Dasar	0.25	Psacharopoulos, (1982)
2. Sekolah Menengah	0.16	Psacharopoulos, (1982)
3. Sekolah Dasar dan menengah	0.14	Payaman, (1981)
4. Sarjana Muda	0.18	Payaman, (1981)
5. Sarjana Muda (dua tahun bekerja setelah lulus)	0.16	Payaman, (1981)
6. Sarjana	0.21	Payaman, (1981)
7. Sarjana (dua tahun bekerja setelah lulus)	0.17	Payaman, (1981)

Sumber : Biaya dan Keuntungan Pendidikan di Indonesia : Sebuah Analisis
(Ace Suryadi dalam mimbar pendidikan hal. 40, 1991)

Melihat tabel di atas, jika dibandingkan antara Sekolah Teknologi Menengah (STM) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) terlihat "Social Rate of Return SMA" lebih besar daripada "Social Rate of Return STM".

Dalam kedua aplikasi perbandingan tersebut, "social rate of return" merupakan besaran hasil perbandingan antara keuntungan sosial (social benefit) dan biaya sosial (social cost) yang berfungsi sebagai alat ukur dari investasi pemerintah atau masyarakat. Setiap proyek yang memiliki "social rate of return" lebih rendah dapat dianggap sebagai investasi sosial yang tidak menguntungkan. Jika demikian perlukah memperjelas isu yang saat ini sedang diperdebatkan mengenai apakah sekolah kejuruan (SLTA Kejuruan) merupakan suatu bentuk investasi sumber daya manusia yang menguntungkan bagi pertumbuhan ? (Ace Suryadi, 1991:43)

Penemuan ini cukup konsisten bahwa keuntungan balik terhadap sekolah menengah tingkat atas lebih besar dari keuntungan balik sekolah kejuruan. Hal ini didukung oleh (1) biaya sekolah kejuruan hampir enam kali lipat lebih besar dari penyelenggaraan sekolah umum (ESR, Bab 2, 1985); dan (2) seperti ditemukan oleh Mc. Mahon bahwa pola penghasilan seumur hidup (life income profile) dari lulusan sekolah umum rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan lulusan sekolah kejuruan (Media Pendidikan No.I Tahun X-April 1991 halaman 42).

Menurut hasil Rapat Kerja dari Panitia Rapat Kerja Nasional Depdikbud (1993) bahwasannya produktivitas rata-rata lulusan pendidikan menengah kejuruan relatif lebih rendah dibandingkan dengan lulusan pendidikan

menengah umum. Keadaan inilah yang menunjukkan agar isi program pendidikan menengah kejuruan perlu ditingkatkan mutunya, diperluas ruang lingkupnya, dan diselaraskan program-programnya dengan kebutuhan dunia kerja agar para lulusannya memiliki kemampuan, baik untuk bekerja secara mandiri maupun untuk dapat dipekerjakan di sektor-sektor formal.

Dengan demikian untuk mengatasi kesenjangan diantara pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja, dalam hal ini kita harus mengidentifikasi apa yang menjadi sebab dari kesenjangan tersebut.

Kesenjangan tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya faktor guru, siswa, kurikulum, fasilitas belajar, sarana dan prasarana, atau memang benar telah diperlukan suatu unit koordinasi yang dapat menaungi sekolah dan dunia kerja, yang mana berfungsi untuk menjembatani kepentingan dari kedua belah pihak sehingga informasi dapat berjalan lancar dan kebutuhan dari kedua belah pihak dapat terpenuhi. Dapat juga faktor-faktor kesenjangan yang ditimbulkan dalam hubungan mekanisme kerja, misalnya antara Depdikbud dengan BPIS, atau Depdikbud terhadap perangkat yang di bawahnya, atau BPIS dengan perangkat yang di bawahnya.

Jika kita menelaah dari faktor guru, maka kita dapat mengingat kembali tulisan dari Unus Suriawiria (Harian PR, 15/3/91) dengan judul : "Beberapa faktor sekitar Minat Baca", Unus menyatakan kesedihannya sewaktu membaca beberapa tulisan dan surat pembaca, bah-

wasannya mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) s.d. Perguruan Tinggi (PT) minat baca di kalangan pendidik cenderung menurun.

Diperoleh juga data yang menyatakan bahwa Indonesia menduduki posisi yang paling rendah di kawasan Asia dalam hal minat baca. Hal ini dilihat dari data statistik yang menunjukkan Indonesia menghabiskan kertas 2.9 kg/capita/tahun, sedangkan Malaysia 30 kg/capita/tahun untuk keperluan membaca dan menulis (Harian Kompas, 27/2/85).

Hal ini dapat menjadikan faktor meningkatnya kesenjangan yang terjadi antara mutu lulusan dengan tuntutan dunia kerja. Seandainya kita sebagai para pendidik sudah mulai menghilangkan kebiasaan untuk berpikir hafalan ("one way of thinking only") tetapi telah menuju ke arah menghubungkan-hubungkan suatu masalah dengan masalah yang lain sehingga menjadi suatu keutuhan (entity) ataupun yang disebut dengan berpikir "Higher order of thinking skill", maka kita dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.

Jika ditinjau dari faktor siswa, apabila tidak ada penyeleksian dan pembatasan terhadap jumlah siswa yang akan diterima di sebuah sekolah, maka dapat saja sekolah tersebut menurun mutunya, kemungkinan siswa-siswa yang masuk beragam kemampuannya mulai dari tingkat lemah sampai tingkat tinggi. Apalagi kalau dihubungkan dengan data "Rate of Return" (lihat tabel 1.1.) bahwa

untuk sebuah STM nilai kembaliannya apabila dibandingkan nilai investasinya yang enam kali lipat lebih besar daripada penyelenggaraan sebuah sekolah umum, diperoleh lebih kecil daripada nilai kembaliannya untuk SMU. Maka dapat saja pada akhirnya semua berlomba untuk masuk SMU daripada STM, apabila dari segi keprofesian tenaga kerja tidak diperhitungkan.

Oleh karena itu kita harus dapat meningkatkan kemampuan dari siswa-siswa SMK, agar dapat bermanfaat bagi dunia kerja. Dengan demikian berarti salah satu cara pemecahan yang saat ini sedang digalakkan di dunia pendidikan adalah dengan adanya program Pendidikan dengan Sistem Ganda (PSG), yang secara tidak langsung jika proporsi materi yang diberikan benar dan tepat, dapat mengatasi permasalahan di dalam kurikulum maupun fasilitas belajar, juga sarana dan prasarannya dan tanpa memikirkan faktor-faktor lain yang bersifat negatif dari penyelenggaraan program Pendidikan dengan Sistem Ganda ini.

Disamping itu dalam penyelenggaraan program PSG ini, tidak mudah untuk dilaksanakan seandainya antara pihak sekolah dan industri tidak terjalin dalam suatu hubungan kerjasama. Oleh karena itu, baik pihak sekolah maupun pihak dunia usaha atau dunia kerja harus dapat untuk saling mendekati dan membuka diri dalam permasalahan ini.

Pendekatan ini tidak mudah, jika tidak ada suatu unit organisasi yang dapat berperan menjembatani dian-

tara kedua belah pihak tersebut. Unit organisasi yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, dikenal dengan nama Majelis Sekolah.

Untuk membatasi masalah di dalam tesis ini, penulis mengarahkan fokus penelitian ini pada kedudukan dan peranan Majelis Sekolah dalam penyelenggaraan program Pendidikan dengan Sistem Ganda (PSG), dengan studi kasus di STM Penerbangan Negeri Bandung. Sedangkan mengenai kemungkinan adanya kesenjangan di dalam mekanisme kerja antara berbagai unit kerja dalam jajaran Depdikbud-BPIS, atau Depdikbud dengan perangkat yang di bawahnya, atau BPIS dengan perangkat yang di bawahnya, hal tersebut di dalam tesis ini disesuaikan dengan topik permasalahan dan dibatasi pada sub sistem yang terlihat di dalam organisasi sekolah dan pada dasarnya pihak sekolah dan industri sebagai pelaksana dari kebijakan Depdikbud dan BPIS.

Apabila kita menyimak konsep dari negara barat, maka salah satu yang melibatkan anggota-anggota masyarakat dalam pendidikan kejuruan (occupational education) adalah melalui unit-unit penasehat (advisory committees). Unit tersebut merupakan ikatan yang positif antara pendidikan kejuruan dan masyarakat. Unit penasehat tersebut dapat didefinisikan sebagai "a group of knowledgeable and concerned citizens, organized to provide guidance for the organization, operation, and improvement of occupational education" (Finch & Mc

Gough, 1982:160-161). Jika diartikan secara bebas merupakan sebuah kelompok yang cakap dan warga negara yang berminat, yang diselenggarakan untuk memberikan arah organisasi, mengoperasikan, dan memajukan pendidikan kejuruan.

Oleh karena itu, pada dasarnya apakah di sekolah-sekolah pendidikan menengah kejuruan khususnya STM-STM Negeri atau instansi lain yang dapat mengkoordinasi beberapa sekolah pendidikan menengah kejuruan, telah dibentuk suatu program unit koordinasi yang berfungsi menjembatani kepentingan sekolah-industri agar sumber daya belajar di sekolah dapat sesuai dengan sumber daya yang ada di industri.

Jika unit tersebut telah dibentuk, sejauh mana efektifitasnya dalam hal sistem informasi bagi kedua belah pihak, sedangkan salah satu faktor keefektifan dalam menjembatani hubungan antara sekolah-industri adalah informasi. Karena kerumitan dari lembaga-lembaga bisnis, sehingga informasi merupakan topik utama dalam penelitian-penelitian saat ini. Informasi, penting bagi suatu organisasi dalam menemukan jawaban-jawaban yang paling " baik/tepat " untuk berbagai pertanyaan khusus (Semprevivo, 1976:113).

Di Indonesia kerjasama dunia usaha dengan Sekolah Menengah Kejuruan akan direalisasikan melalui Badan Penasehat Pendidikan Kejuruan (BPPK). Menurut Direktur Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Depdikbud J. Pakpahan, pembentukan BPPK adalah bagian dari kebi-

jakan pelaksanaan kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1994. BPPK dibentuk dari tingkat pusat, tingkat propinsi, hingga lembaga SMK masing-masing (Kompas, 14/7/93 hal.12).

Pada saat ini hubungan kerjasama tersebut telah diresmikan dan terdiri dari dua versi, yaitu berdasarkan Naskah Perjanjian Kerjasama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kamar Dagang Indonesia (Depdikbud-Kadin) dan versi yang lain antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Pengelola Industri Strategis (Depdikbud-BPIS).

Dari versi yang pertama melahirkan Majelis Pendidikan Kejuruan Indonesia (MPKI) yang terbagi atas MPK Nasional di tingkat pusat, MPK di tingkat propinsi, dan Majelis Sekolah (MS) di tingkat kotamadya. Dari versi yang kedua melahirkan Tim Pengarah, Tim Koordinasi, dan Majelis Sekolah.

Untuk hubungan kerjasama antara Sekolah Teknologi Menengah Penerbangan Negeri Bandung di bawah payung Depdikbud dengan PT IPTN di bawah payung BPIS, berdasarkan pada Naskah Perjanjian Kerjasama Depdikbud-BPIS. Secara operasionalnya, dalam melaksanakan tugas sehari-hari, tim koordinasi yang diketuai oleh Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan ini membentuk kembali :

1. Sekretariat yang berkedudukan di Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan, Jakarta;

2. Majelis Sekolah yang berkedudukan di STM Penerbangan Negeri Bandung.

B. Masalah

1. Rumusan masalah

Sesuai dengan isi latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalahnya secara umum adalah sebagai berikut:

"Sejauh mana kedudukan dan peranan Majelis Sekolah dalam penyelenggaraan program Pendidikan dengan Sistem Ganda"

2. Anggapan Dasar

Hubungan diantara STM Negeri Penerbangan dengan PT IPTN telah berlangsung dalam dua periode, yaitu periode pertama sejak 1985-1990, kemudian dilanjutkan periode kedua 1990-1995. Hubungan tersebut dalam periode kedua ini lebih meluas yang tadinya berdasarkan perjanjian kerjasama antara Depdikbud-BPPT-PT IPTN, sekarang menjadi Depdikbud-BPIS. Oleh karena itu sudah selayaknya program Pendidikan dengan Sistem Ganda dilaksanakan di sekolah tersebut agar pengembangan sumber daya untuk belajar dapat sesuai dengan sumber daya yang ada di industri, dengan demikian dapat mengurangi kecenderungan bahwa isi program pendidikan terlalu berorientasi pada penguasaan prestasi akademik serta memberikan peluang yang memadai kepada lulusan yang tidak dapat melanjutkan pendidikan untuk terjun ke masyarakat dan

dunia kerja.

Secara operasionalnya maka rumusan masalah tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui studi ini, yaitu :

- a. Bagaimanakah upaya-upaya tim Majelis Sekolah dalam hal menjembatani hubungan antara pihak SMK dengan pihak industri ?
- b. Apakah tugas dan kewajiban Majelis Sekolah ?
- c. Bagaimana sistem pemilihan anggota-anggota tim Majelis Sekolah ?
- d. Bagaimana proses penyelenggaraan program Pendidikan dengan Sistem Ganda ?
- e. Kedudukan dan peranan tim Majelis Sekolah dalam struktur organisasi Pola kerjasama Pelaksanaan program Pendidikan dengan Sistem Ganda tersebut ?
- f. Apakah keuntungan dan kendala bagi sekolah, murid, dan industri dalam program Pendidikan dengan Sistem Ganda tersebut ?
- g. Apakah keuntungan dan kendala dalam membina hubungan kerjasama tersebut ?

C. Analisa Masalah

Setelah membahas latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka untuk menganalisa masalah di dalam tesis ini, kita dapat meninjau kembali isi dari tujuan Pendidikan Nasional pasal 4 UU RI No.2 Tahun 1989, yaitu : Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Secara operasionalnya kita dapat melihat isi pasal 29 PP RI No.29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah, yaitu:

1. Penyelenggara sekolah menengah dapat bekerjasama dengan masyarakat terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
2. Untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara profesional.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain.

Selain itu dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1993 diamanatkan bahwa " *Pendidikan Nasional perlu terus ditata, dikembangkan dan dimantapkan upaya itu perlu didukung oleh peningkatan sumber daya pendidikan secara bertahap, disertai keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya sehingga mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan* ".

Dengan mempertimbangkan isi pasal-pasal di atas,

sebagai salah satu lembaga pendidikan, sekolah menengah kejuruan mempunyai andil dalam meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menghasilkan sumber daya manusia produktif yang bertanggungjawab atas pembangunan bangsa sebagaimana tercermin dalam tujuan pendidikan tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentu saja mengalami dan menghadapi berbagai kendala. Masalahnya disini bagaimana mengatasi kendala-kendala tersebut, agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang produktif.

Oleh karena itu dialog diantara dunia pendidikan dan masyarakat harus diperluas sebagaimana penegasan Bapak Presiden Soeharto yang dikemukakan pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Depdikbud 1993 di Istana Negara, Jakarta, 3 /8/1993 (Kompas, 4/8/1993).

Pernyataan Kepala Negara di atas bertitik tolak dari pemikiran bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan tanggungjawab bersama pemerintah, masyarakat dan keluarga (tercantum dalam Bab VIII pasal 33 UU No 2/1989).

Jadi dengan dikembangkannya hubungan diantara dunia pendidikan dan dunia kerja, maka diharapkan segala macam informasi dapat diperoleh dengan segera sehingga kendala-kendala yang terdapat diantara keduanya dapat segera diatasi. Misalnya Finch & Mc Gough (1982:-161) menguraikan keuntungan-keuntungan dengan diselenggarakannya hubungan tersebut yaitu akan mengetahui

keadaan pasar tenaga kerja saat ini dan yang akan datang, dapat mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan, dapat membantu program penempatan lulusan, dan lain-lain yang akan dibahas pada bab landasan teori nanti.

D. Tujuan Penelitian

1. Secara Umum

Tujuan penelitian ditinjau secara umum, yaitu agar dapat mengetahui dengan pasti kedudukan dan peranan Majelis Sekolah dalam hubungan kerjasama antara STM Penerbangan Negeri Bandung dengan PT IPTN untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya belajar agar sesuai dengan sumber daya yang ada di industri, yang secara tidak langsung turut mendukung pelaksanaan program Pendidikan dan Pelatihan dengan Sistem Ganda.

2. Secara Khusus

Sedangkan tujuan penelitian yang lebih khusus, adalah:

- a. Mendeskripsikan upaya-upaya tim Majelis Sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi agar pengembangan sumber daya belajar di sekolah sesuai dengan sumber daya yang ada di industri.

- b. Mendeskripsikan kedudukan dan peranan dari tim Majelis Sekolah dalam alur informasi pola kerjasama pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda.

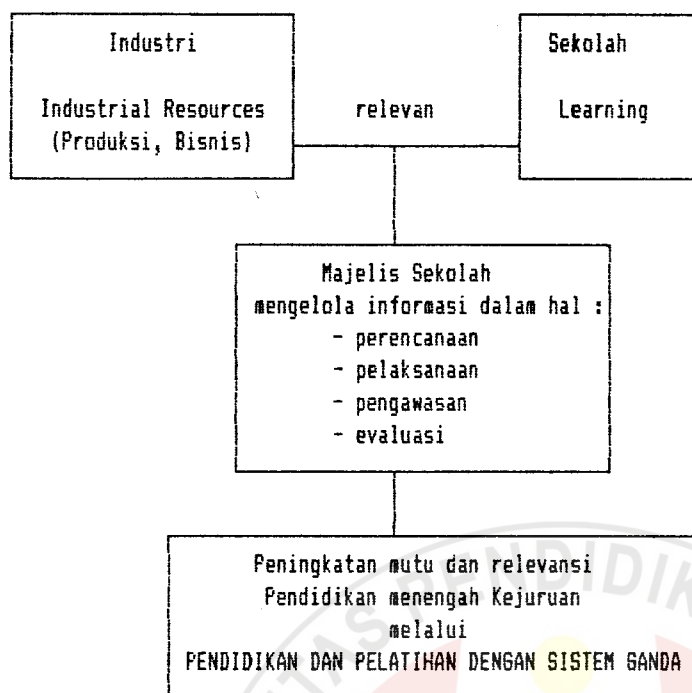
E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari mengadakan penelitian ini dapat dilihat dari apa yang menjadi tujuan penelitian. Tanpa adanya keterkaitan antara tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian ini menjadi kurang bermakna. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. untuk menunjang program pemerintah yang tercantum dalam pasal-pasal di atas serta menyusun perencanaan pendidikan yang lebih baik;
2. mengatasi kesenjangan yang terjadi diantara dunia pendidikan dan dunia kerja;
3. agar mendapatkan informasi yang bersifat segera dan tidak ketinggalan jaman;
4. agar menghasilkan lulusan yang siap dididik dan telah mengenal keadaan lapangan kerja;
5. agar kualifikasi lulusan dari dunia pendidikan tidak terlalu mengecewakan bagi dunia kerja;
6. dengan mengadakan hubungan kerjasama antara dunia pendidikan dengan dunia kerja, dapat diperoleh dual system sehingga proses pelaksanaan program Pendidikan Sistem Ganda dapat dilaksanakan baik di sekolah maupun di industri dan jika memungkinkan fasilitas biaya dapat dikordinir bersama.

F. Paradigma Penelitian

Pada dasarnya, di sekolah terdapat sumber daya belajar seperti guru, fasilitas belajar, murid, dan kurikulum. Di industri terdapat juga sumber-sumber daya yang dapat mendukung proses belajar di sekolah. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan ilmu yang diperoleh di sekolah dapat mendekati keadaan sesungguhnya yang ada di dunia kerja. Agar sumber daya belajar di sekolah dapat sesuai dengan sumber daya yang ada di industri, maka dari itu diharapkan dunia pendidikan mampu mendekati dunia kerja, begitupun dengan industri agar memperoleh tenaga kerja yang minimal siap untuk dididik, mengenal keadaan dan aturan-aturan di dalam dunia kerja, serta mengenal benda kerja dan hal-hal lain yang ada di industri. Untuk mengarahkan cara berpikir peneliti dalam penelitian ini, maka penulis akan menyusun paradigma penelitian tersebut seperti kerangka di bawah ini :



Gambar 1.1. Kerangka berpikir konseptual penelitian